

Irfani

ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272

Volume 13 Nomor 1 Juni 2017

Halaman 115-130

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

PROBLEMA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL* PADA SEKOLAH-SEKOLAH DASAR DI WILAYAH PEDESAAN

Momy A. Hunowu

Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan program full day school (FDS). Penelitian bertujuan mengetahui problema implementasi kebijakan program FDS di sekolah dasar wilayah pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di sekolah dasar di kecamatan Biluhu dan kecamatan Pulubala. Penelitian menemukan bahwa terdapat empat problema utama dalam implementasi kebijakan FDS di sekolah dasar di pedesaan, pertama adalah aspek kultural. Program FDS telah menimbulkan cultural shock baik pada peserta didik, guru maupun kalangan orangtua. Aspek kedua ketersediaan sarana pendidikan yang apa adanya, baik sarana perpustakaan, musholla dan sarana olahraga. Ketiga adalah ketidaksiapan para guru dalam menerapkan kurikulum FDS baik dari segi kualitas maupun kuantitas, keempat, kurikulum FDS yang belum terurai secara rinci sehingga tidak berjalan efektif di lapangan. Dengan demikian, program FDS sedang membudayakan kebiasaan baru dalam membentuk karakter anak-anak bangsa, namun masih terkendala tenaga profesional dan sarana pendidikan yang tidak tersedia di sekolah dasar wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Problema, Implementasi Kebijakan, FDS, Sekolah dasar, Wilayah Pedesaan

A. Pendahuluan

Sudah menjadi keniscayaan bahwa lingkungan sosial dapat mempengaruhi anak dalam bertindak baik maupun buruk. Jika ia bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku yang kurang baik maka kemungkinan ia juga akan terpengaruh oleh teman-temannya. Akan tetapi jika ia bergaul dengan teman-teman yang berperilaku baik maka anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik.

Dalam perspektif sosiologi, anak yang baru lahir tidak dapat hidup tanpa bantuan orang dewasa dalam lingkungannya. Dalam proses sosialisasi individu mengembangkan lambang-lambang sebagai alat komunikasi, terutama bahasa yang memudahkan transmisi pengalaman dari generasi tua kepada generasi muda. Selanjutnya lingkungan sosial budaya memberikan model atau contoh bentuk

kelakuan yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat. Anak-anak diharapkan berkelakuan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya.¹ Dalam kaitan ini, pembentukan karakter menjadi solusi yang kini sedang giat-giatnya digalakkan untuk melahirkan calon-calon pemimpin masa depan, sebagai antitesa terhadap keberadaan pemimpin-pemimpin masa kini.

Revolusi mental adalah program pemerintah yang menggerakkan seluruh masyarakat Indonesia untuk memperbaiki karakter bangsa agar bisa menjadi Indonesia yang lebih baik². Di Indonesia, permasalahan banyak timbul akibat kesalahan pada karakter dan mental bangsa. Misalnya, mulai dari perilaku buruk para pejabat dengan kasus korupsi yang tiada henti, pelanggaran hak asasi manusia, sampai hal-hal kecil seperti malas antri dan mau menang sendiri. Tingkat kasus korupsi di Indonesia sudah sangat tinggi, bahkan menjadi salah satu yang terburuk di Asia³. Program revolusi mental dicanangkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Itulah kenapa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta merta menelorkan kebijakan publik dalam bentuk program *full day school*. Tak butuh waktu lama untuk menyusun agenda dan memformulasikan kebijakannya. Meski pada awalnya, gagasan ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (media sosial), tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkeyakinan besar untuk tetap mengimplementasikan kebijakan program FDS.

FDS merupakan model sekolah umum yang memadukan sistem pengajaran Islam secara intensif yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Biasanya jam tambahan itu dialokasikan pada jam setelah sholat zuhur sampai sholat ashar, sehingga praktis sekolah model ini masuk pukul 07.00 pulang pada pukul 15.15.⁴

Jadi melalui program FDS, setelah belajar setengah hari peserta didik tidak langsung pulang ke rumah, namun dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi. Selain waktu luang anak-anak terisi dengan kegiatan positif, anak-anak terhindar dari lingkungan sosial yang sudah semakin mengkhawatirkan.

Sebagai program uji coba, sejak September 2016, sudah ada 500 sekolah yang akan menjadi percontohan penerapan program FDS. "Saat ini masih dalam tahap persiapannya," kata Muhadjir Effendy, diwawancarai salah satu media online

¹S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 13.

²Mengapa revolusi Mental Diperlukan? <https://www.sayanda.com/pengertian-revolusi-mental/> diakses tanggal 22 Januari 2017.

³Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati dan Indonesia berada pada peringkat 88 setelah 2 tahun sebelumnya berada pada peringkat 107.

⁴*Ibid.*

usai menjadi pembicara seminar yang digelar di Padang, Sabtu, 24 September 2016. Jumlah 500 sekolah itu, katanya, berasal dari berbagai jenjang sekolah. Mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat (SLTA). Disebutkan Muhadjir, sekolah-sekolah yang akan menjadi percontohan tersebut adalah sekolah di Jakarta.⁵

Tanpa harus berpolemik berkepanjangan, program FDS sudah di depan mata. Pemerintah Kabupaten Gorontalo langsung mengadopsi kebijakan ini dan sudah memulai sejak Januari 2017. Kementerian pendidikan dan kebudayaan memang secara rinci belum menetapkan aturan mengenai penerapan pembelajaran program FDS, namun pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan panduan pelaksanaan program FDS. Bahwa sekolah diberikan kebebasan untuk berkegiatan, bertanggungjawab dan juga memiliki otonomi yang sebesar-besarnya, sehingga timbul kompetisi satu sama lainnya. Berdasarkan pernyataan ini, maka FDS di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan catatan bahwa standar pendidikannya terpenuhi dan ditegakkan. Semua dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu. Bahwa sekolah yang melaksanakan FDS perlu mempertimbangkan kesiapan atau ketersediaan sarana dan prasarana dan kesiapan fisik lainnya. Selain itu, harus memiliki pola manajemen berbasis sekolah yang baik, penerapan pembelajaran yang berciri aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Memahami pengaruh perubahan pola belajar dan pola hidup siswa serta melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat⁶.

Meski implementasi kebijakan program FDS masih dalam bentuk kebijakan yang belum memiliki landasan yang rinci dan matang, namun pemerintah kabupaten Gorontalo tidak perlu menunggu lama untuk mengimplementasikan kebijakan pembelajaran program FDS ini, dengan harapan, pendidikan tidak hanya meningkatkan daya pikir melainkan pula meningkatkan kemampuan dan menanamkan kebiasaan belajar sendiri sesuai dengan bakat dan daya perkembangan peserta didik.

Meski demikian, tidak sedikit pula orangtua yang resisten dengan implementasi kebijakan program FDS di Kabupaten Gorontalo. Selain karena dilakukan serta-merta tanpa adanya sosialisasi yang maksimal, juga tidak dilakukan uji coba pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya mendahulukan sekolah di wilayah perkotaan. Sedemikian rupa, sehingga program FDS menjadi beban baru bagi para orangtua sekaligus tekanan psikis dan fisik bagi siswa dan para guru di sekolah-sekolah pedesaan.

⁵<http://www.antaraneews.com/berita/586367/500-sekolah-dipilih-terapkan-full-day-school>, diakses tgl 20 Februari 2017.

⁶*Panduan Program Full Day School SD, SMP, SMA/SMK* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, 2016

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam terutama ingin mengetahui secara nyata mengenai implementasi kebijakan program FDS di Kabupaten Gorontalo yang telah mendahului pelaksanaan uji coba di 500 sekolah di DKI Jakarta.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini, penulis akan mengkaji mengenai konsep dan teori yang akan dijadikan pisau analisis terhadap topik yang diteliti.

1. Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Namun dalam penelitian ini, penulis mengutip definisi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana⁷

Merespon pendapat tersebut, Suharno merumuskan definisi kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik --melalui kekuasaan pemerintah-- terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan *pemerintah* guna memecahkan masalah *publik*. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan. Kata ‘publik’ dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti *negara* –sistem politik serta administrasi. Sementara ‘pemerintah’ adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem –bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, negara hingga supra negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).⁸

Dalam implementasinya, kebijakan publik memiliki kerangka kerja kebijakan publik yang ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai, apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh

⁷Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 2

⁸Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: UNY Press, 2010).

lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top down approach atau bottom up approach, otoriter atau demokratis.

Untuk dapat mengetahui bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan, maka harus diketahui lebih dahulu bagaimana proses analisis kebijakan publik. Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Dari uraian ini, dapat dikemukakan tahapan penyusunan kebijakan public yaitu: 1) penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, 5) penilaian kebijakan.⁹ Dalam penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa penyusunan agenda dan formulasi kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara pemerintah daerah telah memasuki tahapan adopsi kebijakan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program *full day school*. Ketika program ini dilaksanakan, pihak pemerintah daerah sambil melakukan evaluasi.

2. Masyarakat Pedesaan

Masyarakat dan pedesaan atau desa, memiliki pengertian tersendiri. Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-

⁹William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 2003. Terjemahan, h. 24-25

mempengaruhi satu sama lain.¹⁰ Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.¹¹ Dari pengertian ini dapat dimaknai bahwa masyarakat pedesaan adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi dan mendiami wilayah pedesaan.

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tercermin dalam perilaku kesehariannya. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di daerah tertentu. Masyarakat desa juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan pada hakekatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Dari uraian ini dapat dipertanyakan apakah lingkungan sosial yang menjadi tempat berinteraksi sosial anak-anak di wilayah pedesaan telah terkontaminasi dengan kriminalitas dan kemajuan teknologi sebagaimana yang terjadi di wilayah perkotaan sehingga kebijakan program FDS di wilayah pedesaan menjadi urgen untuk diimplementasikan? Jawaban atas pertanyaan ini akan dielaborasi dalam pembahasan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

3. Pendidikan Karakter

Pendidikan Karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil¹².

Dalam *pengertian makna pendidikan karakter* di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

¹⁰ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h. 47

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 144

¹² Annonymous, *Pengertian Makna Pendidikan Karakter*, (online) <http://www.yudinet.com/pendidikan/pengertian-makna-pendidikan-karakter/> diakses 12 Nopember 2011.

Pembentukan karakter SDM menjadi sangat urgen dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global. Tantangan regional dan global yang dimaksud adalah bagaimana generasi muda tidak sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tapi aspek afektif dan moralitas juga terbangun secara kokoh.

Lickona (1992) menjelaskan beberapa alasan perlunya Pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggungjawab, (5) Demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) Tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik, dan (8) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat.

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang semakin kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya kepercayaan diri, dan lain-lain.

Pandangan ini mengilustrasikan bahwa proses pendidikan yang ada di pendidikan formal, non formal dan informal harus mengajarkan peserta didik atau anak untuk saling peduli dan membantu dengan penuh keakraban tanpa diskriminasi karena didasarkan dengan nilai-nilai moral dan persahabatan. Di sini nampak bahwa peran pendidik dan tokoh panutan sangat membantu membentuk karakter peserta didik menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Implementasi kebijakan program FDS adalah sebuah rangkaian dari upaya pendidikan karakter di Indonesia. Meskipun pendidikan karakter dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja di lingkungan pendidikan, tetapi upaya ini harus didukung oleh sebuah kebijakan yang tegas, terstruktur dan terkendali, sehingga pendidikan karakter tidak hanya sekedar wacana pembelajaran, melainkan operasional dalam pembelajaran.

4. Program *Full Day School* dan *Cultural Shock*

Program *full day school* atau sekolah sehabian penuh adalah sebuah program yang sedang diadopsi oleh pemerintah kabupaten Gorontalo sebagai salah satu solusi menghadapi kemajuan teknologi, terutama penggunaan *smartphone* yang sudah merambah dunia anak-anak sekolah¹³. Konsep FDS semakin menegaskan bahwa ruang gerak bagi para orang tua dalam berperan sebagai pendidik di rumah semakin kehilangan legitimasinya, diperparah dengan kondisi lingkungan sosial yang semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak-anak, sehingga lingkungan sekolah adalah area paling aman bagi tumbuh kembang anak dewasa ini¹⁴.

Meski menuai pro dan kontra, program *full day school* sudah dalam tahap uji coba di beberapa sekolah percontohan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung perwujudan ideal pendidikan yaitu terpenuhinya pengetahuan umum dan terbangunnya karakter. Agar dalam pelaksanaannya tidak terus dikritik, kebijakan tersebut kini sudah tidak lagi dikenal dengan istilah *full day school* yang dianggap menyesatkan. Kebijakan tersebut sekarang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Penguatan Karakter (PPK). Sesuai dengan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di akhir tahun 2016, Kemendikbud telah memilih 500 lebih sekolah di seluruh Indonesia sebagai percontohan program PPK. Tepatnya ada 542 sekolah yang sudah jadi percontohan. Program percontohan PPK itu di tahap awal bentuknya pelatihan terhadap kepala sekolah-kepala sekolah dari sekolah terpilih¹⁵.

Sekolah-sekolah yang menjadi percontohan di 34 provinsi tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, sekolah harus sudah menerapkan kurikulum 2013. Kedua, berdasarkan lokasi. setiap provinsi harus terwakili. Selain sekolah yang dipilih Kemendikbud, jumlah 542 sekolah tersebut sudah termasuk sekolah-sekolah yang secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi sekolah percontohan. Sekolah yang dipilih tidak hanya yang berlokasi di perkotaan. Justru, menurut Arie, sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil diberi perhatian khusus atau diprioritaskan¹⁶.

Untuk mata pelajarannya tidak ada yang baru. Hanya setiap mata pelajaran yang ada di sekolah harus diperkuat dengan praktik-praktik pembentuk karakter. Pembentuk karakter ini sifatnya *build-in* di dalam setiap mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler.

¹³Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, *Panduan Program FDS*, h.6.

¹⁴Momy A. Hunowu, *Konsep Full Day School dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam, Irfani, Vol. No. 1. Juni 2016.

¹⁵<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kelanjutannya.program.full.day.school>. diakses tanggal 21 Februari 2017

¹⁶*Ibid.*

Sekolah juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti museum, balai-balai budaya, kantor pemerintah, dan LSM. Bisa dengan berkolaborasi mengadakan kunjungan untuk *study tour* atau mendatangkan pihak-pihak tersebut untuk berbagi pengetahuan di sekolah. Setelah 542 sekolah menjadi percontohan di akhir 2016, tahun ini Kemendikbud menargetkan 9.800 sekolah menjadi percontohan program PPK.¹⁷

Dalam kenyataannya, penerapan program FDS akan melahirkan perubahan kebiasaan dan nilai budaya tertentu. Jika perubahan ini sulit diterima masyarakat, dalam hal ini peserta didik, orangtua dan guru, maka akan menyebabkan adanya keterkejutan atau *cultural shock*. Istilah *cultural shock* pertama kali diperkenalkan oleh Oberg (1960) untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustrasi dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru.¹⁸

Berbagai pendapat yang menjelaskan tentang *cultural shock*, terutama berkaitan dengan keberadaan seseorang yang berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada adanya kebijakan baru yang menyebabkan *cultural shock* karena terpaksa harus meninggalkan budaya dan kebiasaan lama. Dalam hubungan ini, pendapat yang relevan adalah yang menyebutkan bahwa *culture shock* adalah ketika seseorang tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan sosial dari kultur baru atau jika ia mengenalnya maka ia tak dapat atau tidak bersedia menampilkan perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Definisi ini menolak penyebutan *culture shock* sebagai gangguan yang sangat kuat dari rutinitas, ego, dan *self-Image individu*.¹⁹ Pandangan lain mengatakan bahwa *cultural shock* adalah suatu bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang baru.²⁰

Menurut hemat penulis, *cultural shock* tidak hanya terjadi pada individu yang mengalami perpindahan negara, tetapi juga pada individu atau komunitas yang mengalami perubahan budaya. Kebijakan program FDS memaksa terjadinya perubahan budaya dan kebiasaan tertentu, terutama berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan terpaksa harus ditinggalkan dengan adanya kebijakan ini.

¹⁷<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kelanjutannya.program.full.day.school>. diakses tanggal 21 Februari 2017.

¹⁸Dayaksini dan Uddaniyah, *Psikologi Sosial* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2003).

¹⁹*Ibid.*

²⁰Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan ini diharapkan dapat menggali fakta-fakta yang mendalam untuk mengetahui problema implementasi kebijakan program FDS di sekolah-sekolah dasar di wilayah pedesaan di Kabupaten Gorontalo. Dalam studi kasus ini, peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya²¹.

baru.

D. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Program *Full day School*

Program FDS menyasar seluruh satuan pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA/SMK sekabupaten Gorontalo dengan rincian; a) sekolah dasar: 293 lembaga, sekolah menengah pertama: 128 lembaga, sekolah menengah atas: 18 lembaga dan sekolah menengah kejuruan: 12 lembaga.

Ketentuan jam masuk sekolah adalah pukul 06.00 Wita diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan, dan pukul 06.30 Wita diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan dan atau yang kondisi geografisnya sulit.

Untuk jenjang sekolah dasar, waktu pelaksanaan dimulai sejak masuk pukul 06.00 wita sampai dengan selesai pukul 14.00 wita pada hari kerja Senin sampai dengan Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kelas I dan II dimulai pada pukul 06.00 Wita sampai dengan 12.00 wita kecuali hari Jumat berakhir pukul 11.00 wita. 2) Kelas III dimulai pukul 06.00 wita sampai pukul 13.10 wita kecuali hari Jumat berakhir pukul 11.00 wita. 3) Kelas IV, V dan VI dimulai pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita kecuali hari Jumat berakhir pada pukul 11.00 wita.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan adalah: 1) Pukul 06.00 s/d 06.15 kegiatan literasi, 2) Pukul 06.15-07.00 kegiatan penguatan imtaq dan pertumbuhan karakter, 3) Pukul 07.00 kegiatan pembelajaran sesuai jenjang, 4) Kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler dan non kurikuler.

²¹ Erna Febru Aries, *Design Action Research* (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), h. 87.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing sekolah terutama pada 4 sekolah yang menjadi obyek penelitian, memiliki perbedaan pada kegiatan sebelum dan sesudah pembelajaran rutin. Perbedaan dalam pelaksanaan ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM serta sarana pembelajaran. Pada awal implementasi kebijakan program FDS di sekolah dasar kecamatan Biluhu, sangat terbantu dengan kehadiran mahasiswa PPLT IAIN Sultan Amai Gorontalo yang sedang menjalankan program sebagai bagian dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Terutama dalam memandu kegiatan siswa pada pagi dan siang hari. Namun setelah mahasiswa usai melaksanakan kegiatannya, SDM yang melaksanakan program FDS berkurang dan berdampak pada efektifitas pelaksanaannya. Dengan demikian, implementasi program FDS terkendala SDM dalam pelaksanaannya di sekolah dasar terutama di wilayah pedesaan.

2. Problema Implementasi Kebijakan Program FDS

Berdasarkan data-data mengenai implementasi kebijakan program FDS terlihat bahwa program ini mengharuskan dinas pendidikan dan kebudayaan menambah jam pelajaran untuk sekolah dasar dari biasanya yaitu tambahan satu jam sebelum dan satu jam setelah jam biasanya.

Pada pagi hari diisi dengan pembobotan karakter serta pembudayaan membaca buku di perpustakaan. Sementara pada siang hari pembobotan ekstrakurikuler dan non kurikuler, baik seni budaya dan olahraga. Selama jam tersebut sangat ditekankan pelaksanaan sholat dhuha dan sholat dzuhur berjamaah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi orangtua siswa dan para guru di SDN 2 Biluhu, SDN 5 Biluhu dan SDN 3 Pulubala sekitar pelaksanaan program FDS ini adalah:

- a. Point utama yang menjadi latar pelaksanaan program FDS adalah bahwa peran orangtua dari hari ke hari semakin berkurang terutama di perkotaan, baik oleh kesibukan mereka maupun pergaulan anak-anak yang kian bebas. Sehingga program FDS sangat dibutuhkan di kota-kota besar. Sementara wilayah Kabupaten Gorontalo sebagian besar adalah wilayah pedesaan. Sehingga banyak asumsi yang berkembang bahwa pemerintah daerah sangat memaksakan penerapan program FDS di wilayah pedesaan.
- b. Jam masuk sekolah pada jam 6 pagi, meskipun daerah-daerah pedalaman diberi kelonggaran masuk jam 6.30, tetapi persiapan berangkat ke sekolah mengharuskan anak-anak, orangtua dan guru bangun pada dini hari.
- c. Rincian kegiatan pada pagi hari sebelum jam belajar dan setelah sholat zuhur belum diatur. Sehingga untuk mengisi kekosongan di pagi hari, para siswa membersihkan halaman dan ruang kelas dan dipantau oleh beberapa guru yang sudah datang lebih awal.

- d. Belum tersedianya fasilitas ekstrakurikuler yang memadai di beberapa sekolah yang diamati. Sehingga setelah sholat dzuhur, kebanyakan anak-anak berkeliaran di sekitar masjid dan halaman sekolah sambil bermain apa adanya. Tidak jarang terjadi insiden perkelahian dan kenakalan lainnya yang tidak terpantau oleh guru.
- e. Jam makan anak menjadi terganggu, karena anak harus dipaksa sarapan sebelum waktunya. Sehingga pada minggu-minggu pertama penerapan program FDS, banyak anak-anak yang jatuh sakit sebagai akibat dari mandi terlalu pagi dan tidak sarapan. Untuk kasus ini, beberapa orangtua mempelesetkan FDS menjadi Flu Day School.
- f. Anak-anak yang tinggal di pelosok dan daerah pegunungan, yang tidak memiliki sumber air terdekat, harus berjuang keras di pagi hari buta pergi mandi dengan menempuh jarak hingga 1 km ke sumber air, padahal kondisinya masih gelap dan melewati semak-semak.
- g. Bagi sekolah yang tidak memiliki guru laki-laki, menjadi masalah bagi anak-anak yang hendak sholat dhuha dan sholat zuhur karena tidak ada yang memimpin sholat. Sehingga anak-anak diarahkan ke masjid-masjid terdekat sekolah agar bisa sholat berjamaah dengan warga sekitar. Kondisi ini sangat rawan dengan membiarkan anak-anak ke masjid tanpa pendampingan guru-guru.
- h. Orangtua siswa harus turun gunung mengantar bekal anak-anaknya di sekolah. Sehingga dianggap mengganggu aktivitas mencari nafkah.
- i. Waktu makan bersama menjadi tidak membahagiakan karena terlihat kesenjangan sosial antar siswa dari jenis makanan yang dibawa.

Point 1 hingga 9 menunjukkan adanya *cultural shock* seiring diimplementasikannya program FDS ini. Sehingga banyak kalangan yang menyayangkan kenapa kebijakan ini dilaksanakan tanpa adanya penyesuaian-penyesuaian yang matang terlebih dahulu. Tidaklah mengherankan, kritikan tidak hanya dilontarkan oleh para orangtua dan para guru, Kritik pun datang dari Pejabat Gubernur Gorontalo, Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang menyebut bahwa FDS belum bisa diterapkan di semua sekolah di Gorontalo dengan beberapa alasan; 1) Penerapan konsep sekolah sehari penuh merupakan skema pendidikan yang membutuhkan banyak persiapan, mulai dari kesiapan guru-guru, ketersediaan ruang makan, ruang ibadah dan kebutuhan lainnya yang mendukung proses belajar hingga sore hari. Di Gorontalo, terutama sekolah-sekolah yang berada di pedesaan belum cukup siap untuk hal ini. 2) secara geografis, rumah-rumah penduduk masyarakat Gorontalo ada yang jauh dari lokasi sekolah. di beberapa kecamatan, ketersediaan sarana transportasi masih terbatas. Jika pemerintah ingin menerapkan program FDS maka terlebih dahulu yang disediakan adalah mobil antar jemput, mengingat jarak tempuh ke sekolah

masih cukup jauh. Jika tidak maka perlu ada asrama bagi siswa yang rumahnya cukup jauh dari sekolah. sehingga untuk skala Gorontalo, masih butuh persiapan yang panjang untuk bisa merubah paradigma penerapan FDS²².

Sehingga menurut hemat penulis, program FDS layak diterapkan di sekolah-sekolah wilayah pedesaan sekiranya faktor-faktor pendukung telah memadai. Sekolah-sekolah dasar di wilayah pedesaan, sangat berbeda kondisi sarana dan prasarananya dibandingkan dengan sekolah-sekolah dasar di wilayah perkotaan. Hal ini sudah dikomunikasikan dengan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan, meski tidak langsung bertemu dengan kepala dinas, tetapi dari personil yang memiliki otoritas menyebutkan bahwa implementasi program FDS masih terus dievaluasi dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat. Bupati Gorontalo secara intens terus melakukan diskusi dan pertemuan dengan para guru di semua wilayah untuk menampung seluruh aspirasi yang berkembang sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program FDS ke depan, yang pasti program ini perlu didukung agar terus berkesinambungan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan, telah dilakukan beberapa penyesuaian agar permasalahan yang dikeluhkan tidak bertumpuk-tumpuk.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan sebagaimana seharusnya, meskipun terlihat agak tergesa-gesa dalam perencanaan. Terlepas dari banyak sorotan dari berbagai pihak, program FDS membawa efek positif, terutama membiasakan anak-anak, guru dan orangtua untuk bangun sejak dini hari. Hal lain yang sangat menyemangati para guru dalam menjalankan program ini adalah diliburkannya kegiatan pembelajaran pada hari Sabtu. Sehingga tidak mengapalah berlama-lama di sekolah selama 5 hari kerja dengan ketambahan libur sehari pada akhir pekan.

Implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan mestinya tidak bisa diseragamkan, dengan mempertimbangkan aspek kultural masyarakat dan aspek geografis sehingga tidak menimbulkan *cultural shock* pada masyarakat di wilayah pedesaan. Yang mana, orangtua siswa sejak turun temurun telah terbiasa dengan budaya sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sedemikian rupa, sehingga irama kehidupan masyarakat pedesaan sudah terpolakan dengan kebiasaan ini. Mereka bisa memanfaatkan tenaga anak-anaknya untuk membantu orangtua baik di rumah maupun di luar rumah. Pada pagi hari sebelum ke sekolah dan sepulang sekolah. Kehadiran program FDS secara mendadak merenggut kebiasaan lama tersebut dan memaksakan para orangtua untuk menyesuaikan dengan budaya baru ini. Insiden protes orangtua yang datang ke sekolah serta keluhan banyak guru adalah beberapa

²²Zudan Arif Fakrulloh, *Full Day School Butuh Persiapan Panjang* (Rubrik Pendidikan, Gorontalo Post, edisi 21 Februari 2017), h. 17.

fenomena yang mengiringi implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, perlu adaptasi dan penyesuaian pasca terjadinya *cultural shock* di kalangan orangtua, anak-anak dan para guru sehingga implementasi kebijakan FDS ini dapat berjalan sesuai harapan.

E. Kesimpulan

Kebijakan Program FDS adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah kabupaten Gorontalo dari pemerintah pusat. Kebijakan ini memiliki muatan pengembangan karakter, penerapannya membutuhkan persiapan yang matang, baik dari aspek tenaga guru, sarana dan kesiapan mental peserta didik dan para orangtua. Persiapan yang matang penting untuk meminimalisir terjadinya *cultural shock*. *Cultural shock* dalam lingkup perubahan kebiasaan, bukan dalam lingkup perubahan lingkungan sosial dan budaya secara umum yang lazim dialami individu yang pindah negara. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, penerapan program FDS di sekolah dasar di wilayah pedesaan belum terlalu mendesak dan bahkan menimbulkan masalah baru terutama di wilayah pesisir dan pegunungan.

F. Daftar Pustaka

- Aries, Erna Febru, *Design Action Research*, Yogyakarta: Aditya Media, 2010.
- Buchori, Mochtar. *Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan Kita*. 2007. Dikutip dari www.tempointeraktif.com/hg/kolom/.../kol,20110201-315,id.html diakses hari minggu 10 April 2017.
- Dayaksini dan Uddaniyah, *Psikologi Sosial*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2003
- Departer, Bobbi., Mark Reardon & Sarah Singger Naurie, *Quantum Teaching (Mempraktekan Quantum teaching di ruang kelas-kelas)*, Bandung: Kaifa, 2003.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, *Panduan Program Full Day School SD, SMP, SMA/SMK*, 2016
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 2003. Terjemaha
- Echols, Jhon M & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, t. th.
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Full Day School Butuh Persiapan Panjang*, Rubrik Pendidikan, Gorontalo Post, edisi 21 Februari 2017.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Hidayatullah, M. Furqon. *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat & Cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2010.

- Hunowu, Momy A., *Konsep Full Day School dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam, Irfani, Vol. No. 1. Juni 2016.
- Hurlock, E.B., *Child Development*, Mc Graw Hill Book Company, NY, USA, 1993
- Imron Rossidy, *Pendidikan Berparadigma Inklusif*, Malang: UINMalang Press, 2009.
- Kemendiknas. *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2010.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Lickona, dkk. *Manfaat Karakteristik Pendidikan bagi Guru untuk Membangun Peradaban Bangsa* 2007. (online) <http://alenmarlissmpn1gresik.wordpress.com/2010/10/03/manfaat-karakteristik-pendidikan-bagi-guru-untuk-membangunperadaban-bangsa/>. Diakses hari Minggu pada tanggal 10 Nopember 2011
- Megawangi, Ratna. *Semua Berakar Pada Karakter*. Jakarta: FE-UI 2006.
- Mengapa revolusi Mental Diperlukan? <https://www.sayanda.com/pengertian-revolusi-mental/>
- Mufidati, Khusnul, *Full Day School dan Terpadu*, Makalah: Program Studi Pendidikan Islam Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Februari 2013.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyana, Deddy *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Prasetyo, Agus dan Emusti Rivasintha, *Konsep, Urgensi Dan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, (online) <http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/27/konsep-urgensi-dan-implementasi-pendidikan-karakter-di-sekolah/> diakses tanggal 2 Desember 2011
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Saikhotin, Sayyidah, *Pengembangan Pendidikan Pesantren Terpadu: Studi Integrasi Keilmuan Islam Dan Keilmuan Umum dalam Format Full Day School Berbasis Pesantren*, Jurnal Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. IV. No. 1, 2013.
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press, 2010
- Susiati, Purnama dan Ali Ashar, *Pelaksanaan Full Day School Sekolah Dasar Islam terpadu Al-Huda Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik (Studi*

Problematika Perkembangan Sosial Peserta Didik), Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Juni 2015

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Zaenudin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kelanjutan.program.full.day.school>. diakses tanggal 21 Februari 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kelanjutan.program.full.day.school>. diakses tanggal 21 Februari 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2610310/mendikbud-500-sekolah-jakarta-jadi-percontohan-full-day-school>, diakses tanggal 21 Februari 2017.

<http://www.SekolahIndonesia.Com/Alirsyad/smu/muqaddimah.Htm/> diakses 20 Agustus 2016.

<http://www.antaraneews.com/berita/586367/500-sekolah-dipilih-terapkan-full-day-school>, diakses tgl 20 Februari 2017.

<http://www.kpai.go.id>, diakses tanggal 21 Februari 2017.